



Manajemen Keuangan Negara dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Indonesia

Nurfaizah Salsabillah, Naomi Boru Tobing, R. Nurhafiza, W Pangestoeti

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

State Financial Management, Sustainable Development, Performance-Based Budgeting, Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Sustainable development is a global agenda that demands countries in the world, including Indonesia, to undertake transformation in state financial governance. One of the important strategies used by the Indonesian government is the implementation of performance-based budgeting. This article aims to analyze the role of state financial management, particularly through the application of performance-based budgeting, in supporting the achievement of sustainable development in Indonesia. The study used a qualitative approach with literature study and policy analysis as the primary methods. Study results show that performance-based budgeting has encouraged transparency, accountability, and effectiveness of state budget use, although it still faces various challenges in its implementation. The article recommends strengthening human resource capacity, integration of information systems, as well as stricter supervision and evaluation as strategic measures to strengthen the role of state financial management in supporting sustainable development.

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang menuntut negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk melakukan transformasi dalam tata kelola keuangan negara. Salah satu strategi penting yang digunakan pemerintah Indonesia adalah implementasi anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen keuangan negara, khususnya melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan sebagai metode utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja telah mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran negara, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi, serta pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran manajemen keuangan negara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah menjadi isu sentral dalam kebijakan publik di seluruh dunia. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial demi kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan sumber daya alam melimpah, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu kunci utama dalam upaya ini adalah manajemen keuangan negarawan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi sistem anggaran berbasis kinerja sebagai instrumen utama dalam reformasi pengelolaan keuangan negara.

Sistem ini diharapkan dapat mengarahkan alokasi sumber daya publik secara lebih tepat sasaran, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, implementasi anggaran berbasis kinerja di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, kapasitas birokrasi, maupun budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana manajemen keuangan

*Corresponding Author

Email: nsalsabillah@student.umrah.ac.id, ntobing@student.umrah.ac.id, rhafriza@student.umrah.ac.id,
wahjoepangostoeti@umrah.ac.id

negara, melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Keuangan Negara dan Pembangunan Berkelanjutan

Manajemen keuangan negara adalah rangkaian proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan negara. Tujuan utama dari manajemen keuangan negara adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, manajemen keuangan negara harus mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan program yang didanai oleh APBN maupun APBD.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), tata kelola keuangan publik yang baik merupakan prasyarat utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi pemerintah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang mengaitkan alokasi dana dengan pencapaian hasil yang terukur (output dan outcome). Pendekatan ini berbeda dengan sistem anggaran tradisional yang lebih menitikberatkan pada input atau besaran dana yang dibelanjakan. Dalam anggaran berbasis kinerja, setiap program dan kegiatan pemerintah harus memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, target yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang transparan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Regulasi ini menuntut setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, serta mengukur kinerja melalui indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Indonesia

Regulasi dan Kebijakan

Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia merupakan bagian dari reformasi keuangan negara yang telah dimulai sejak awal tahun 2000-an. Pemerintah secara konsisten memperkuat kerangka regulasi dengan menerbitkan berbagai peraturan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu kebijakan penting adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja secara sistematis.

Selain itu, pemerintah juga mengadopsi prinsip "money follows program", yaitu anggaran dialokasikan pada program-program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hasil, bukan sekadar output administrasi.

Praktik Implementasi di Berbagai Tingkatan Pemerintahan

Implementasi anggaran berbasis kinerja di Indonesia dilakukan di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Setiap kementerian/lembaga diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berbasis pada pencapaian kinerja. Di tingkat daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga menerapkan sistem serupa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, antara lain:

- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menyusun dan mengelola anggaran berbasis kinerja.
- Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART).
- Resistensi birokrasi terhadap perubahan sistem, terutama di daerah yang masih terbiasa dengan pola anggaran tradisional.
- Kurangnya integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah daerah yang berhasil mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja dengan baik, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kota Surabaya. Keberhasilan ini umumnya didukung oleh kepemimpinan yang kuat, komitmen politik, serta dukungan teknologi informasi yang memadai.

Studi Kasus: Dampak Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Salah satu studi kasus yang menarik adalah implementasi anggaran berbasis kinerja di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Program-program prioritas, seperti pengelolaan sampah, pembangunan ruang terbuka hijau, dan pelayanan kesehatan masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dan dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasilnya, Kota Surabaya memperoleh berbagai penghargaan nasional dan internasional dalam bidang tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan.

Peran Manajemen Keuangan Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dukungan terhadap Program Pembangunan Berkelanjutan

Manajemen keuangan negara yang baik memungkinkan pemerintah untuk mendanai berbagai program pembangunan berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur hijau, energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pencapaian target SDGs, antara lain melalui program penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan sistem kesehatan nasional.

Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan konsep green budgeting, yaitu penganggaran yang memperhatikan dampak lingkungan dari setiap program dan kegiatan. Melalui green budgeting, alokasi anggaran dapat diarahkan pada program-program yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, serta pelestarian keanekaragaman hayati.

Inovasi dan Kolaborasi Multi-Stakeholder

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, manajemen keuangan negara juga harus mampu mendorong inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat pendanaan, memperluas jangkauan program, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai contoh, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia dan Asian Development Bank dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur hijau dan energi terbarukan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran juga semakin diperkuat melalui mekanisme partisipatif, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum konsultasi publik.

Tantangan Dan Strategi Perbaikan

Tantangan Implementasi

Meskipun telah banyak kemajuan, implementasi anggaran berbasis kinerja di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- **Kapasitas SDM yang Belum Merata:** Banyak aparatur pemerintah, khususnya di daerah, masih belum memahami secara mendalam konsep dan teknis anggaran berbasis kinerja.
- **Keterbatasan Data dan Sistem Informasi:** Kurangnya data yang valid dan sistem informasi yang terintegrasi menghambat proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.
- **Budaya Kerja Birokrasi:** Masih kuatnya budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada rutinitas dan administrasi, bukan pada hasil dan dampak.
- **Pengawasan dan Evaluasi yang Lemah:** Mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga masih terdapat celah untuk penyalahgunaan anggaran.

Strategi Perbaikan

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sejumlah strategi perbaikan, antara lain:

- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi bagi aparatur pemerintah di semua tingkatan.
- **Penguatan Sistem Informasi:** Pengembangan dan integrasi sistem informasi keuangan dan kinerja yang andal, sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi.
- **Perubahan Budaya Organisasi:** Mendorong perubahan budaya kerja birokrasi dari orientasi administrasi menuju orientasi hasil dan dampak, melalui insentif dan penghargaan bagi kinerja terbaik.
- **Pengawasan dan Evaluasi yang Ketat:** Memperkuat peran lembaga pengawasan internal dan eksternal, serta melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi kinerja pemerintah.
- **Komitmen Politik dan Kepemimpinan yang Kuat:** Dukungan dari pimpinan tertinggi sangat penting untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan reformasi pengelolaan keuangan negara.

SIMPULAN

Manajemen keuangan negara melalui implementasi anggaran berbasis kinerja telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sistem ini mendorong penggunaan anggaran negara yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, upaya perbaikan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi, serta komitmen politik yang kuat sangat diperlukan untuk memperkuat peran manajemen keuangan negara dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat sinergi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara lebih optimal, adil, dan inklusif.

REFERENSI

- Bastian, I. (2001). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi keuangan daerah (akuntansi sektor publik)*. Jakarta: PT INDEKS.
- Halim, A. (2004). *Manajemen keuangan daerah edisi revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- United Nations Development Programme. (2018). *Public finance for sustainable development*. UNDP.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan keuangan pemerintah pusat*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis. (2017). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)*.